**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Manajer perusahaan sebagai seorang manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interested behavior*) dalam melakukan tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya. Munculnya praktik manajemen laba (*earnings management*) disebabkan karena manajemen perusahaan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada para pemegang saham. Ketidakseimbangan informasi ini menjadi salah satu konflik yang mengakibatkan munculnya sifat oportunis dari manajemen untuk melakukan manipulasi laba demi memaksimumkan kepentingan pribadinya.

Mekanisme *good corporate governance* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengelola perusahaan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil yang ingin dicapai dengan mekanisme *good corporate governance* ini adalah untuk mengurangi praktik *earnings management* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut didukung oleh teori-teori yang akan dibahas lebih lanjut pada bab ini.

1. **Landasan Teoritis**

**Grand Theory**

1. **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Timbulnya praktik *earning management* dapat dijelaskan dengan *agency theory.* Menurut Jensen & Meckling (1976:5) mendefinisikan *agency theory* sebagai suatu kontrak yang terdiri dari adanya pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dengan melakukan pendelegasian pertanggungjawaban atas *decision making* kepada manajer. Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* akan menciptakan permasalahan agensi. Konflik ini akan muncul seiring dengan berkembangnya perusahaan, dimana *principal* memiliki kewajiban untuk memberikan balas jasa kepada *agent* dan *agent* memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya kepada *principal.*

Menurut Eisenhardt (1989), terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia yang dapat menjelaskan tentang *agency theory* yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Dengan adanya tiga asumsi sifat dasar manusia menurut Eisenhardt tersebut, *agent* akan cenderung bersifat oportunis. Sebagai seorang manusia, *agent* akan mengutamakan kepentingan pribadinya.

Pada *agency theory* dengan adanya motivasi yang berbeda dari pihak *agent* dan pihak *principal* akan menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Pihak *agent* mempunyai motivasi untuk mendapatkan investasi dari investor, pinjaman dari kreditur, ataupun kontrak kompensasi. Pihak *principal* memiliki motivasi yang berbeda dari *agent*, *principal* menginginkan profitabilitas yang selalu meningkat sehingga dapat menyejahterakan dirinya.

*Agent* dan *principal* memiliki keinginan yang sama dalam hal mengoptimalkan *utility* mereka dengan informasi yang dimiliki. Tetapi di satu sisi, *principal* memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan *agent*. Ketidakseimbangan informasi yang terjadi disebut dengan *information asymmetry.* Adanya keterbatasan informasi akan membuat *principal* sulit untuk memonitor kinerja *agent*. Oleh karena itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh *agent* tanpa sepengetahuan *principal.*

Menurut Jensen & Meckling (1976:6), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1. *The monitoring expenditure by the principle* (*monitoring cost*), yaitu biaya dikeluarkan oleh *principal* untuk memberikan batasan pada aktivitas-aktivitas *agent* agar tidak menyimpangdalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure* (*bounding cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *agent* sendiri sebagai bentuk jaminan bahwa dirinya tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan *principal.*
3. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat *utility* dari *principal* ataupun *agent* karena terdapat hubungan agensi.

**Manajemen Laba (*Earnings Management*)**

1. **Definisi Manajemen Laba (*Earnings Management*)**

Sulistyanto (2008:48) memberikan definisi manajemen laba sebagai sebuah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Healy & Wahlen (1999) menjelaskan bahwa manajemen laba terjadi ketika para manajer perusahaan menggunakan keputusan-keputusan tertentu di dalam suatu laporan keuangan dan mengubah transaksi-transaksi dalam laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder* tentang kinerja ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang memiliki ketergantungan pada angka-angka akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen laba (*earnings management*) merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan pribadi ataupun keuntungan perusahaan.

1. **Faktor-faktor yang Mendorong Manajemen Laba (*Earnings Management*)**

Dalam *positive accounting theory* yang disampaikan Watts & Zimmerman (1986:260-262) terdapat tiga hipotesis yang menjadi latar belakang terjadinya *earnings management*, yaitu

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya bahkan bila harus menggunakan biaya pihak kontraktor lain. Para manajer perusahaan dengan *bonus plans* lebih memilih menggunakan metode-metode akuntansi untuk meningkatkan pendapatan periode berjalan yang dilaporkan.

1. *Debt Covenant Hypothesis*

Semakin tinggi rasio utang atau ekuitas, maka semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode-metode akuntasi untuk meningkatkan pendapatan. Dalam menjaga reputasi perusahaan, manajer perusahaan yang melakukan perjanjian kredit akan menjalankan kebijakan dengan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan sehingga berdampak dalam mengurangi hambatan utang dan mengurangi kegagalan teknis.

1. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan besar lebih cenderung menggunakan metode-metode akuntansi untuk menurunkan laba yang dilaporkan daripada perusahaan kecil. Hal ini terjadi karena dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

1. **Motivasi Manajemen Laba (*Earnings Management*)**

Terdapat berbagai motivasi yang disampaikan Scott (2015:448-458) terkait penyebab manajer perusahaan melakukan *earnings management*, yaitu

1. Rencana Bonus (*Bonus Scheme*)

Manajer yang menggunakan *bonus scheme* akan berusaha menghindari metode akuntansi yang melaporkan *net income* lebih rendah. Manajer lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, laba akuntansi tersebut digunakan untuk menentukan besarnya bonus. Dalam *bonus scheme* terdapat dua istilah, yaitu *bogey* (tingkat laba minimum untuk memperoleh bonus) dan *cap* (tingkat laba maksimum untuk memperoleh bonus). Jika laba berada di bawah *bogey*, maka manajer akan mengurangi laba bersih dan tidak mendapat bonus sama sekali. Namun, jika laba di atas *cap*, maka bonus dapat diperoleh tergantung dari kontrak yang dilakukan antara manajer dengan pemegang saham.

1. Kontrak Utang Jangka Panjang (*Debt Covenant*)

*Debt covenant* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan untuk melindungi kreditur dari tindakan-tindakan manajemen yang dapat menurunkan keamanan dan menaikkan risiko bagi kreditur. Motivasi *debt covenant* ini sejalan dengan debt covenant hypothesis dalam *positive accounting theory*, yaitu untuk dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran kontrak yang dilakukan perusahaan, manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba di periode mendatang ke periode berjalan.

1. Motivasi Politik (*Political Motivations*)

Aktivitas dari perusahaan besar dan strategis yang melibatkan hajat hidup orang banyak akan mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Hasilnya perusahaan akan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik dengan tujuan memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.

1. Motivasi Perpajakan (*Taxation Motivations*)

Manajemen mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Berbagai macam metode akunntansi dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk penghematan pajak perusahaan.

1. Pergantian Direksi (*Charges of Chief Executive Officer (CEO)*)

Motivasi-motivasi akan muncul menjelang waktu pergantian direksi. Direksi (CEO) yang mendekati masa akhir dari jabatan atau pension akan cenderung menaikkan laba perusahaan sehingga bonus mereka akan meningkat. Demikian juga dengan direksi (CEO) yang kurang berhasil dalam memperbaiki kinerja perusahaan, mereka akan cenderung menaikkan laba untuk mencegah pemecatannya.

1. Penawaran Perdana (*Initial Public Offering*)

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki harga pasar karena baru akan pertama kali menawarkan sahamnya di pasar modal. Hal ini menjadi masalah bagi manajer perusahaan dalam menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Pihak manajemen perusahaan melakukan *earnings management* untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan untuk mendapatkan respon yang positif dari pasar terhadap nilai perusahaannya.

1. **Pola Manajemen Laba (*Earnings Management*)**

Menurut Scott (2015:447) terdapat berbagai pola manajemen laba, yaitu

1. *Taking a Bath*

Pola ini biasanya terjadi apabila adanya reorganisasional termasuk pemilihan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya yang dilakukan ketika keadaan sedang buruk dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Manajemen membebankan perkiraan biaya yang akan datang dan menghapus beberapa aktiva serta melakukan *clear the desk*. Akibatnya, laba pada periode berikutnya akan meningkat dari yang sebelumnya.

1. *Income Minimization*

*Income minimization* mirip dengan *taking a bath*, tetapi lebih sedikit ekstrim dengan maksud supaya tidak mendapat perhatian secara politis.Pola ini biasanya digunakan ketika profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan tujuan menghindari pajak dan alasan *political cost hypothesis*. Kebijakan yang diambil dari pola *income minimization* adalah penghapusan atas barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

1. *Income Maximization*

*Income maximization* merupakan kebalikan dari *income minimization*. Pola ini dilakukan saat laba sedang menurun sehingga untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, manajer akan memanipulasi data akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan. Kebijakan yang diambil dari pola *income maximization* adalah mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya, dan memindahkan biaya untuk periode lain.

1. *Income Smoothing*

*Income smoothing* merupakan pola yang paling menarik, sering digunakan, dan paling popular. Investor lebih cenderung menyukai laba yang relatif stabil dan tidak berisiko tinggi. Maka dari itu pihak manajemen akan berusaha mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar dengan cara meratakan laba yang dilaporkan.

**Nilai Perusahaan**

1. **Definisi Nilai Perusahaan**

Husnan (2016:6) menjelaskan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar kemakmuran pemilik perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan menurut Ferina, Tjandrakirana, & Ismail (2015) tercermin pada kekuatan harga saham yang diperjualbelikan, semakin bagus prospek perusahaan di masa mendatang maka semakin tinggi nilai sahamnya. Oleh sebab itu, masyarakat dan manajemen perusahaan harus mengetahui nilai dari suatu perusahaan. Investor dalam upayanya untuk memiliki perusahaan *go public* harus membayar harga saham yang sudah beredar di pasar saham.

Memberikan kemakmuran para *stakeholder* secara maksimal merupakan suatu tujuan yang dapat diwujudkan dengan memaksimumkan nilai sekarang (*present value*) semua keuntungan para *stakeholder* yang diharapkan akan diperoleh di masa depan. Harga saham merupakan indikator untuk menunjukkan nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi menyatakan kemakmuran para *stakeholder* juga semakin meningkat. Dengan demikian apabila harga pasar saham meningkat membuktikan nilai perusahaan meningkat Sartono (2014:8).

1. **Pengukuran Nilai Perusahaan**

Salah satu alat ukur dalam menentukan nilai perusahaan yang dapat digunakan adalah *Q* *ratio* atau rasio Tobin’s Q. Pada tahun 1966 rasio ini diperkenalkan pertama kali oleh Nicholas Kaldor dalam artikelnya yang berjudul “*Marginal Productivity and the Macro-Economy Theory of Distribution: Comment on Samuelson and Modigliani”*. Kemudian pada tahun 1968, James Tobin memperkenalkan kembali rasio ini. Tobin’s Q merupakan indikator dalam mengukur nilai perusahaan yang menunjukkan kinerja manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan (Rahmawati, Topowijono, & Sulasmiyati, 2015).

Menurut Dewi, Handayani, & Nuzula (2014), rasio Tobin’s Q merupakan rasio yang dapat memberikan informasi terbaik dalam mencerminkan nilai perusahaan karena rasio ini dapat menjelaskan berbagai macam fenomena dalam kegiatan yang ada di perusahaan. Rasio ini paling banyak digunakan dalam mengukur data keuangan perusahaan karena di dalam perhitungannya rasio ini memasukkan semua unsur dari utang dan modal saham perusahaan. Unsur-unsur ini tidak hanya terdiri dari ekuitas *stakeholder* dan saham biasa saja, tetapi seluruh asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan yang masuk kategori rendah akan menghasilkan nilai perusahaan yang lebih rendah daripada biaya penggantian aktiva yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi apabila hasil perhitungan Tobin’s Q yang didapat antara 0 sampai 1 yang membuat pasar menilai kurang perusahaan tersebut. Perusahaan yang masuk kategori tinggi memiliki nilai Tobin’s Q lebih dari 1 yang berarti nilai perusahaannya lebih besar dibandingkan nilai perusahaan yang tercatat (Dewi et al., 2014). Semakin tinggi nilai Tobin’s Q suatu perusahaan maka prospek perusahaan di masa datang akan semakin baik sehingga investor akan mendapatkan keuntungan dari penanaman modal di perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat rasio dari Tobin’s Q di suatu perusahaan maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu dan sukses dalam menciptakan nilai bagi *stakeholder* (Hasibuan, AR, & NP, 2016).

***Good Corporate Governance***

1. **Definisi *Good Corporate Governance***

Menurut *Forum for Corporate Governance* FCGI (2000:1), *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder*, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Corporate governance* dapat juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Penerapan praktik *good corporate governance* juga diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 yang menjelaskan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya dengan berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan dan mencegah terjadinya manipulasi serta kesalahan dalam mengelola suatu perusahaan dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan atau organisasi tersebut yang disebut *good corporate governance*. Konsep *good corporate governance* ini memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu perusahaan.

1. **Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

Penerapan konsep *good corporate governance* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam mengembalikan kepercayaan dari para *stakeholder*. Menurut Agoes & Ardana (2009:106-107) terdapat tujuan dan manfaat dari penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan, yaitu

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Sedangkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 menjelaskan tujuan dari penerapan *good corporate governance* pada BUMN adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.
3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.
7. **Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Terdapat lima prinsip *good corporate governance* dalam Keputusan Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *good corporate governance* oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu

1. Transparansi

Prinsip ini menuntut para pengelola untuk terbuka dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan serta terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan mengenai perusahaan. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi memiliki arti bahwa informasi yang disampaikan harus benar, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

1. Kemandirian

Prinsip ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan harus dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan harus bersifat mandiri. Keputusan yang diambil pihak pengelola harus bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

1. Akuntabilitas

Para pengelola perusahaan wajib membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya. Pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif apabila ada kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ.

1. Pertanggungjawaban

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan harus sesuai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Para pengelola perusahaan wajib bertanggungjawab atas semua tindakan mereka dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai suatu wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

1. Kewajaran

Prinsip kewajaran menjunjung keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pengelola perusahaan wajib memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, karyawan, pemodal, dan pelanggan) maupun pemangku kepentingan sekunder (masyarakat, pemerintah, dan yang lainnya).

1. **Mekanisme Good Corporate Governance**
2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Investor institusional yang terlibat dalam pengambilan keputusan tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba yang terjadi (Santoso, 2017). Keberadaan investor institusional diduga mampu menjadi mekanisme yang efektif dalam memonitor setiap *decision making* oleh manajer perusahaan.

Kepemilikan institusional di dalam proses *monitoring* para manajer perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Proses pengawasan yang dilakukan secara selektif dapat mengurangi tindakan oportunis dari manajemen yang merugikan *stakeholder*. Presentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan suatu laporan keuangan perusahaan.

1. Kepemilikan Manajerial

Manajer perusahaan umumnya memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan daripada pihak pemegang saham. Hal inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara *agent* (manajer)dan *principal* (pemegang saham). Ketidakseimbangan informasi ini disebut juga sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Berawal dari adanya ketidakseimbangan informasi inilah yang memotivasi manajer untuk menyajikan informasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya kepada pihak *principal*.

Permasalahan diatas dapat diatasi dengan menyamakan kepentingan anara *agent* dan *principal* dalam perusahaan tersebut. Hal ini menjadikan manajer juga sebagai pemilik selain menjadi pengelola dalam perusahaan. Menurut Bodie, Kane, & Marcus (2014:6-7), kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (*outsider ownership*) sehingga dapat diperoleh manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai akibat dari kesalahan dalam *decision making*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemegang saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari.

1. Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:13)menjelaskan bahwa dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independent dan komisaris yang terafiliasi. Pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri disebut dengan pihak yang terafiliasi. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dalam Pasal 21 ayat (3) menjelaskan dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independent wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (FCGI, 2000:7-8) menjelaskan bahwa kriteria komisaris independen diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *Outside Directors*.

Adapun kriteria persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang komisaris independen, yaitu

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat professional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.
8. Komite Audit

Komite audit menurut Skousen, Glover, & Prawitt (2005:12) adalah sebuah sub-komite dari dewan direksi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta audit internal dan eksternal. Sedangkan menurut Arens, Elder, & Beasley (2014:135) komite audit adalah sejumlah orang yang dipilih oleh perusahaan dan memiliki tanggungjawab dalam membantu auditor untuk tetap independen. Umumnya komite audit itu terdiri dari tiga hingga lima atau terkadang sampai tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

Adapun tugas dari komite audit menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006:15)adalah sebagai berikut:

1. Memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
2. Memastikan struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Memastikan pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
4. Memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh pihak manajemen.

1. **Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Judul | Peran Praktek *Corporate Governance* sebagai *Moderating Variable* dari Pengaruh *Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan |
| Penulis | Tanyawati |
| Tahun | 2012 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010 |
| Variabel Dependen | Nilai Perusahaan |
| Variabel Independen | *Earnings Management* |
| Variabel Moderasi | Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, dan Komisaris Independen |
| Hasil Penelitian | * Manajemen laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara negatif. * Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh antara hubungan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. * Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan. * Kualitas audit memiliki pengaruh positif antara hubungan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. * Peranan komisaris independent memberikan pengaruh negatif antara hubungan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Judul | Analisis Pengaruh Mekanisme *Good* *Corporate Governance* terhadap Praktek Manajemen Laba |
| Penulis | Teguh Setiawan |
| Tahun | 2009 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007 |
| Variabel Dependen | Manajemen Laba |
| Variabel Independen | Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Dewan Komisaris, dan Komite Audit |
| Hasil Penelitian | * Hasil Uji F menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. * Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, variabel ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, variabel lainnya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba |

|  |  |
| --- | --- |
| Judul | Analisis Pengaruh Struktur dan Mekanisme *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba |
| Penulis | Intania Destiani Putri dan Syuhada Sofyan |
| Tahun | 2013 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011 |
| Variabel Dependen | Manajemen Laba |
| Variabel Independen | Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage |
| Hasil Penelitian | * Kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba. * Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. * Komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. * Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. * Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. * *Leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. |

|  |  |
| --- | --- |
| Judul | Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Governance* sebagai Pemoderasi |
| Penulis | Herman Darwis |
| Tahun | 2012 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010 |
| Variabel Dependen | Nilai Perusahaan |
| Variabel Independen | Manajemen Laba |
| Variabel Moderasi | Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional |
| Hasil Penelitian | * Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. * Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan nilai perusahaan. * Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan nilai perusahaan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Judul | Pengaruh *Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi dengan Praktik *Corporate Governance* |
| Penulis | Lulus Sri Lestari dan Sugeng Pamudji |
| Tahun | 2013 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011 |
| Variabel Dependen | Nilai Perusahaan |
| Variabel Independen | *Earnings Management* |
| Variabel Moderasi | Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit |
| Hasil Penelitian | * Manajemen laba memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. * Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit secara terpisah maupun secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. * Variabel *corporate governance* tidak keseluruhan berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. |

1. **Kerangka Pemikiran**
2. ***Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan**

Keberadaan *earnings management* dipengaruhi oleh konflik adanya perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan pihak *principal* yang muncul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai kepentingan dan kemakmuran dirinya sendiri. Tujuan utama perusahaan adalah nilai perusahaan yang tinggi sehingga dapat tercipta kemakmuran bagi pemegang saham. Salah satu penyebab naik atau turunnya nilai perusahaan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal inilah yang mendorong manajemen perusahaan melakukan *earnings management* untuk meningkatkan nilai perusahaan (Abdallah & Suryani, 2018).

Menurut Ridwan & Gunardi (2013) apabila laba dalam laporan keuangan lebih besar dari aliran kas operasi akan membuat nilai perusahaan meningkat untuk saat ini. Bilamana manajer melakukan manajemen laba maka laba perusahaan akan meningkat sehingga turut meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan membuat harga pasar saham meningkat, sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, dapat dilihat dari penelitiannya bahwa *earnings management* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1. ***Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional**

Investor yang canggih (*sophisticated*) merupakan julukan yang diberikan kepada investor institusional karena dapat lebih baik menggunakan informasi periode saat ini untuk memprediksi laba di masa mendatang daripada investor non institusional (Ridwan & Gunardi, 2013). Darwis (2012) menyatakan bahwa pihak investor institusional dipercaya dapat mengontrol perusahaan dengan lebih teliti sehingga tindakan oportunis pihak manajer perusahaan dalam melakukan *earnings management* dapat dikurangi. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak investor institusional dapat memperlemah pengaruh *earnings manajemen* terhadap nilai perusahaan.

Tingkat kepemilikan investor institusional yang tinggi akan meningkatkan pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Proses *monitoring* yang dilakukan secara efektif ini akan mengurangi *agency cost* yang terjadi di perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Herawaty (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

1. ***Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi oleh Kepemilikan Manajerial**

Menurut *agency theory*, terdapat *agency conflict* yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan pihak *principal*. Hubungan antara pihak *agent* dan pihak *principal* ini dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena *agent* lebih memiliki banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pihak *agent* dan pihak *principal* adalah dengan mekanisme struktur kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu dalam menyatukan kepentingan antara pihak manajer perusahaan dengan pemegang saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976) semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan meningkatkan usaha manajemen dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian Ujiyantho & Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sehingga mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi *agency conflict*.

1. ***Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi oleh Komisaris Independen**

Komisaris independen memegang peran yang sangat penting dalam perusahaan dan dalam mekanisme *good coporate governance*. Komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, dan memberikan perlindungan kepada *stakeholder*. Disamping perusahaan memiliki dewan komisaris, peran komisaris independen juga sangat diperlukan untuk mengawasi manajemen atau mengawasi kebijaksanaan direksi di dalam mengelola kegiatan yang terjadi di perusahaan.

Menurut penelitian Xie, Davidson, & DaDalt (2003) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris akan mempengaruhi *earnings management*. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independent lebih efektif daripada pengawasan yang dilakukan oleh komisaris dari dalam perusahaan. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki komisaris independen lebih banyak akan mengurangi tindakan *earnings management* dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki komisaris independen yang lebih sedikit. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan laporan keuangan lebih ketat sehingga dapat menghindari praktik manajemen laba dan meningkatkan nilai perusahaan.

1. ***Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi oleh Komite Audit**

Komite audit memiliki tanggungjawab untuk mengawasi audit eksternal dan laporan keuangan serta mengamati sistem pengendalian internal dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi sifat oportunis manajemen yang ingin melakukan *earnings management*. Komite audit juga berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan, jika dilihat dari sisi kepercayaan investor terhadap pemeriksaan laporan keuangan dengan mengurangi manajemen laba. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara *stakeholder* dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Penelitian dari Xie, Davidson, & DaDalt (2003) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *earnings management* yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa komite audit dianggap mampu dalam melindungi kepentingan *stakeholder* dari tindakan *earnings management* tersebut. Oleh karena itu, penelitian kali ini memiliki hipotesis bahwa komite audit dapat memperlemah hubungan *earnings management* terhadap nilai perusahaan.

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Pemikiran**

***Earnings Management***

**Nilai Perusahaan**

**Komite Audit**

**Komisaris Independen**

**Kepemilikan Manajerial**

**Kepemilikan Institusional**

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis-hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : *Earnings management* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

H2 : Semakin besar presentase kepemilikan institusional akan memperlemah pengaruh

*earnings management* terhadap nilai perusahaan.

H3 : Semakin besar presentase kepemilikan manajerial akan memperlemah pengaruh

*earnings management* terhadap nilai perusahaan.

H4 : Semakin besar proporsi komisaris independen akan memperlemah pengaruh

*earnings management* terhadap nilai perusahaan.

H5 : Semakin banyak jumlah komite audit akan memperlemah pengaruh *earnings*

*management* terhadap nilai perusahaan.